

**PERBANDINGAN (DE)KONSOLIDASI DEMOKRASI:
STUDI PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA DAN
FILIPINA PADA PERIODE 2016-2020**

***THE COMPARISON OF DEMOCRATIC (DE)CONSOLIDATION:
THE STUDY OF DEMOCRATIC REGRESSION IN INDONESIA AND
PHILIPPINES 2016-2020***

Damar Kristal

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Kertamukti No.5 Pisangan, Ciputat Timur 15419
E-mail: damar.kristal002@gmail.com

Diterima: 18 Juni 2021; direvisi 9 Agustus 2021; disetujui 27 November 2021

Abstract

In the last five years, democracy index rating institutes such as Freedom House, The Economist Intelligence Unit, and Varieties of Democracy have provided data on the decline in the quality of democracy around the world. An established democracy like America is not immune from democratic regression. The Philippines and Indonesia are two countries in Southeast Asia that experienced a significant decline in the quality of democracy from 2016 to 2020. This study uses the theory of democratic consolidation and populism. This article analyzes the role of four elements in democratic consolidation (society, elite, organization, and the rule of law) and the influence of populism in the phenomenon of the declining quality of democracy in the two countries. There is a decline in the quality of democracy in both countries during the 2016-2020 period. The process of democratic consolidation has been turning into a cycle of democratic deconsolidation. Four key elements in the consolidation of democratic have a big role in declining in the quality of democracy in Indonesia and the Philippines. Although there are differences in the classification of populism, the figures of populist leaders in the Philippines and Indonesia have exacerbated the declining quality of democracy.

Keywords: *democratic consolidation, democratic deconsolidation, Indonesia, Philippines, populism*

Abstrak

Dalam lima tahun terakhir, lembaga pemeringkat indeks demokrasi Freedom House, The Economist Intelligence Unit's, dan Varieties of Democracy menampilkan data terjadinya penurunan kualitas demokrasi di dunia. Negara dengan demokrasi yang sudah mapan seperti Amerika tidak luput dari regresi demokrasi. Filipina dan Indonesia merupakan dua negara di Asia Tenggara yang mengalami penurunan kualitas demokrasi cukup signifikan pada tahun 2016 sampai 2020. Penelitian ini menggunakan teori konsolidasi demokrasi dan teori populisme untuk menjelaskan peran unsur-unsur konsolidasi demokrasi (masyarakat, elite, organisasi, dan *rule of law*) dan pengaruh populisme dalam fenomena penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina pada periode 2016-2020. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina pada periode tersebut. Proses konsolidasi demokrasi di dua negara ini berubah menjadi proses dekonsolidasi demokrasi. Elemen-elemen dalam konsolidasi demokrasi (masyarakat, elite, organisasi, dan *rule of law*) memiliki peran dalam terjadinya penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina. Walaupun terdapat perbedaan klasifikasi populisme, figure pemimpin populis di Filipina dan Indonesia memperparah penurunan kualitas demokrasi di dua negara ini sejak 2016 sampai 2020.

Kata Kunci: dekonsolidasi demokrasi, Filipina, Indonesia, konsolidasi demokrasi, populisme

Pendahuluan

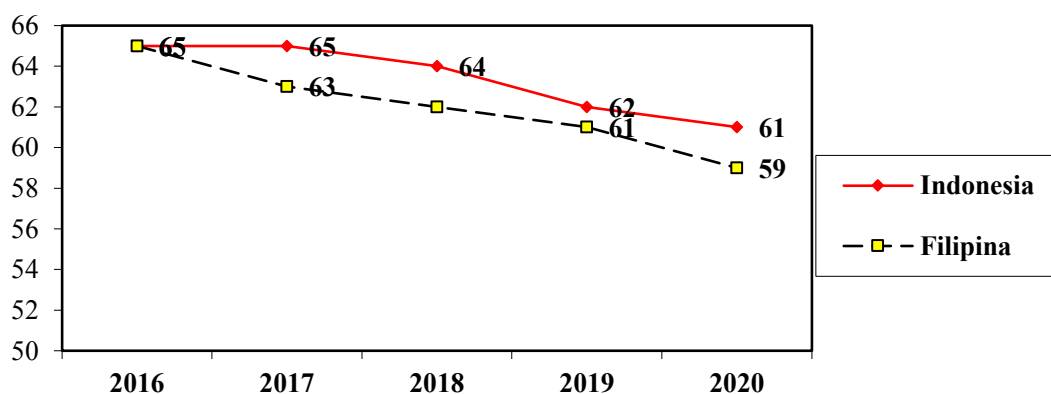
Sejak 2013 level demokrasi di Indonesia turun dari *free democracy* menjadi *partly free democracy*. Namun, penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 sampai 2020. Penurunan yang signifikan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di Filipina. Banyak fenomena yang memengaruhi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dan Filipina.

Data dari Freedom House menunjukkan bahwa kedua negara ini memiliki indeks demokrasi yang hampir sama, hanya memiliki perbedaan skor 1 angka. Pada 2019 Indonesia meraih skor 62 dari 100. Sedangkan Filipina meraih skor 61 dari 100. Semakin tinggi skornya, maka indeks demokrasi suatu negara akan semakin baik. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini adalah kedua negara ini hanya meraih predikat *partly free democracy* jika mengacu pada data Freedom House.

korupsi yang masih tinggi di masing-masing negara (Freedom House, 2020).

Dari tahun 2016 sampai 2020, yang menjadi permasalahan utama pada demokrasi di Filipina adalah hak politik dan kebebasan sipil. Belakangan ini pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte indeks demokrasi di Filipina kembali mengalami stagnasi dan penurunan. Hal ini karena diberlakukannya kebijakan Duterte untuk memerangi narkoba. Kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya aksi *vigilante* tembak di tempat terhadap terduga pengguna dan pengedar narkoba. Pada aspek pluralisme politik, Filipina mengalami kenaikan kekerasan terhadap pihak oposisi. Kekerasan ini terjadi dalam bentuk kriminalisasi dan penuntutan terhadap oposisi yang dilakukan oleh pihak pemerintah (Freedom House, 2020).

Dari data-data di atas, ada dua aspek yang mengalami penurunan. *Pertama*, aspek



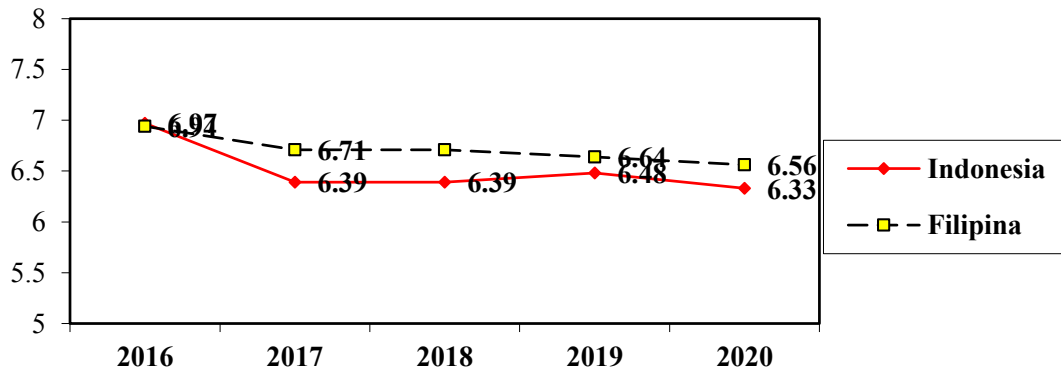
Sumber: Freedom House Indonesia & Philippines 2016-2020

Grafik 1. Kurva Indeks Demokrasi Freedom House Indonesia dan Filipina Periode 2016-2020

Indeks demokrasi yang diukur oleh Freedom House berasal dari indikator hak politik dan juga kebebasan sipil. Dari dua indikator tersebut yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah kebebasan sipil. Indikator kebebasan sipil di Indonesia dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Penurunan tersebut beriringan dengan naiknya kasus persekusi yang dilakukan kepada etnis minoritas dan kepercayaan minoritas. Pada aspek hukum, kebebasan untuk berpendapat dan beraspirasi juga semakin berat karena adanya pasal UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Selain itu, permasalahan yang sama yang juga dialami oleh Filipina adalah masalah

kebebasan yang terbagi menjadi dua, yaitu aspek hak politik dan aspek kebebasan sipil. *Kedua*, aspek peraturan dan juga regulasi. Ditinjau dari data-data yang ada, kedua aspek tersebut secara simultan mengalami penurunan dari 2016 sampai 2020. Dalam hal ini, konsolidasi demokrasi yang tidak stabil juga memengaruhi turunnya kedua aspek tersebut.

Selain lembaga Freedom House, unit kerja dari The Economist yaitu EIU (Economist Intelligence Unit) juga melakukan pengukuran indeks demokrasi di seluruh dunia. EIU merilis indeks demokrasi yang didasarkan dari lima hal yaitu proses elektoral dan pluralisme, kinerja



Sumber: The Economist Intelligent Unit Democracy Index

Grafik 2. Kurva Indeks Demokrasi The Economist Intelligence Unit's Indonesia dan Filipina Periode 2016-2020

pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil (The Economist, 2019).

Data yang dirilis oleh EIU terbilang lebih dinamis dibandingkan dengan data yang dirilis oleh Freedom House. Dalam data EIU Indonesia dan Filipina mengalami dinamika yang lebih besar. Data EIU juga memiliki keterkaitan dengan konsolidasi demokrasi di dua negara tersebut, karena dalam beberapa pemaparan ditunjukkan bahwa penyebab turunnya indeks tersebut juga disebabkan oleh unsur-unsur dalam konsolidasi demokrasi yang tidak terintegrasi dengan baik. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa tahun 2016 menandakan turunnya indeks demokrasi di Indonesia dan Filipina.

Untuk melengkapi data di atas, EIU juga merilis data indeks demokrasi dunia pada tahun 2020. Indonesia kembali mengalami penurunan skor dari yang semula adalah 6.48 menjadi 6.33. Skor tersebut merupakan yang terendah selama 13 tahun EIU merilis indeks demokrasi. Indonesia turun menjadi peringkat 65. Filipina juga mengalami hal yang sama, yaitu penurunan skor menjadi 6.56, dan penurunan peringkat menjadi 55 (The Economist, 2021).

Selain dua lembaga di atas, lembaga Varieties of Democracy (V-Dem) yang juga mengukur kualitas demokrasi di seluruh dunia memberikan data yang tidak jauh berbeda dengan data milik Freedom House dan EIU. Penurunan kualitas demokrasi yang terjadi di Filipina dan Indonesia berasal dari tiga aspek utama, yaitu demokrasi liberal, demokrasi elektoral, dan komponen partisipasi politik. Penurunan sudah

terjadi sejak tahun 2013, tetapi penurunan yang cukup signifikan terjadi sejak 2016 sampai 2020. Tiga aspek tersebut mengalami penurunan. Di Indonesia, penurunan yang cukup signifikan adalah aspek demokrasi liberal dan demokrasi elektoral, sedangkan di Filipina, semua aspek tersebut mengalami penurunan yang signifikan (V-Dem Institute, 2020).

Walaupun sudah lebih dari 30 tahun (Filipina) dan 20 tahun (Indonesia) terlepas dari genggaman pemerintah yang otoriter, demokrasi di Indonesia dan Filipina tidak terlepas dari bahaya. Dalam beberapa tahun terakhir banyak unsur yang menyebabkan demokrasi di kedua negara tersebut kembali terancam. Unsur-unsur konsolidasi demokrasi yang tidak terintegrasi mengubah proses konsolidasi menjadi dekonsolidasi demokrasi (V-Dem Institute, 2020).

Beberapa tahun belakangan ini sorotan yang muncul terkait indeks demokrasi di Indonesia dan Filipina adalah berhubungan dengan penurunan kualitas demokrasi di kedua negara yang ditengarai oleh presiden yang populis. Indonesia dengan Joko Widodo (Jokowi), dan Filipina dengan Duterte. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dan diimplementasikan oleh Indonesia dan Filipina dianggap menjadi salah satu faktor yang menyebabkan indeks demokrasi masing-masing negara menurun. Kebijakan seperti UU ITE di Indonesia dan UU Bayanihan di Filipina membuat terjadinya regresi pada aspek kebebasan berekspresi. Selain itu, kebebasan dan independensi dari media terus tergerus dengan adanya pemusatan

kepemilikan dan intervensi kekuasaan. Di sisi lain, dalam lima tahun terakhir tidak ada kebijakan yang dihasilkan oleh kedua presiden untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM masa lalu dan mencegah pelanggaran HAM yang akan datang. Oleh karena itu, baik Filipina maupun Indonesia sama-sama tidak mengalami kemajuan penegakan HAM dalam beberapa tahun terakhir (Yahya, 2020).

Di Indonesia, banyaknya tindakan dan aksi yang bersifat intoleran dan regulasi/kebijakan yang tidak pro terhadap kaum minoritas disinyalir menyumbang sebagian dari penyebab turunnya indeks demokrasi. Hal tersebut juga diperparah dengan munculnya RUU KUHP (Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada 2019 yang memantik demonstrasi besar-besaran dari kelompok mahasiswa sejak reformasi. Protes diajukan terhadap RUU KUHP karena ada banyak pasal yang dianggap melenceng, seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat membuat penindakan terhadap para koruptor menjadi tumpul (Idhom, 2019).

Sementara di Filipina, kebijakan tembak di tempat terhadap terduga pengedar dan pengguna narkoba merupakan contoh nyata terhadap penyebab turunnya indeks demokrasi di negara tersebut. Diungkapkan oleh mantan anggota DDS (Davao Death Squads) bahwa yang membuat dan mengorganisir DDS adalah Presiden Duterte sendiri. Pada kasus Duterte ini bagai dua sisi dalam satu koin. Di satu sisi, keamanan yang tercipta melalui kebijakan tembak di tempat bisa mengurangi atau menekan tindak kriminal, tetapi di lain sisi, kebijakan tersebut bertentangan dengan HAM. Presiden Duterte melanggar HAM karena pembentukan dan pengorganisir kelompok tersebut, pengadilan tingkat tinggi belum dapat memberikan sanksi kepada Presiden. Hal itu membuktikan bahwa perjuangan melalui institusi legal tidak cukup, oleh karena itu, perjuangan harus didukung oleh pergerakan dari bawah (Miller, 2018).

Dengan melihat latar belakang di atas, tulisan ini akan menganalisis lebih lanjut penurunan demokrasi di Indonesia dan Filipina

pada kurun waktu antara tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan teori konsolidasi demokrasi dan teori populisme untuk menjelaskan peran unsur-unsur konsolidasi demokrasi, seperti masyarakat, elite, organisasi, dan *rule of law*, serta pengaruh populisme dalam fenomena penurunan kualitas demokrasi di kedua negara. Sebelum masuk pada pembahasan, terlebih dahulu akan dibahas mengenai teori konsolidasi demokrasi dan teori populisme.

Teori Konsolidasi Demokrasi dan Populisme

Menurut Larry Diamond, ada tiga indikator utama dalam konsolidasi demokrasi, yaitu masyarakat, elite, organisasi. Selain itu juga ada unsur penting lain, yaitu elemen *rule of law*. Keempat elemen penting ini diperlukan untuk saling berintegrasi dalam menciptakan demokrasi yang terkonsolidasi. Keempat elemen ini juga perlu memiliki preferensi utama, yaitu demokrasi merupakan sistem terbaik. Selain itu, proses konsolidasi demokrasi juga perlu dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan kuat setelah jatuhnya rezim otoriter. Unsur-unsur tersebut memiliki peranan penting untuk dapat mewujudkan hal tersebut (Diamond, 2003).

Lebih lanjut, Larry Diamond menjabarkan klasifikasi dari tiga indikator utama dalam konsolidasi demokrasi. Masyarakat, dalam hal ini adalah *ordinary citizens* atau masyarakat biasa. Elite dalam hal ini adalah pemimpin pemerintahan, pejabat pemerintahan, dan elite partai. Lalu yang dimaksud dengan organisasi merupakan partai politik dan institusi demokrasi (Diamond, 2003).

Sementara itu, terkait dengan teori populisme, Cass Mudde menekankan tiga poin penting, yaitu *anti-establishment*, otoriterisme, dan nativisme. Populisme dikenal sebagai sebuah filosofi yang menekankan kepercayaan yang bijaksana dan penilaian orang biasa terhadap pemerintah yang dianggap korup. Populisme merefleksikan sinisme dan juga kebencian yang mendalam terhadap pemerintah yang ada. Populisme juga

memiliki karakteristik yang condong terhadap pemerintahan yang ada. Selain itu, populis lebih menyukai bentuk-bentuk demokrasi mayoritas untuk mengekspresikan suara mereka, melalui *polling* opini, dan referendum daripada *check and balance* terhadap perlindungan kaum minoritas yang dimasukkan dalam demokrasi keterwakilan. Pada akhirnya, populisme lebih condong untuk menganut *mono-culturalism* daripada *multiculturalism* (Inglehart dan Pippa Norris, 2016).

Ada tiga aspek yang krusial dalam konsep populisme. *Pertama*, rakyat adalah segalanya, yang juga lebih menekankan perasaan sebagai komunitas kolektif. Sebaliknya, segregasi sosial-horisontal, dan pembelahan ideologi kanan-kiri kurang ditonjolkan. *Kedua*, kaum populis lebih menitikberatkan aspek pengkhianatan elite terhadap rakyat melalui modus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan yang lainnya. *Ketiga*, kaum populis menuntut agar *primacy of the people* direstorasi melalui penempatan pemimpin kharismatik yang menyuarakan hati nurani rakyat (Muhtadi, 2019).

Permasalahan yang sering ditemukan pada pemimpin populis adalah mereka seringkali menganggap bahwa apa yang dilakukan merupakan keinginan dan kehendak rakyat. Sikap ini membawa bahaya laten bagi demokrasi, tidak hanya pada negara yang demokrasi sudah mapan, tapi juga di negara yang baru mengalami demokrasi. Dalam beberapa kasus seperti di Brazil dan Venezuela, pemimpin populis pada akhirnya membawa negara yang mereka pimpin menjadi lebih otoriter. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikembangkan dan diimplementasikan hanya untuk mendapatkan dukungan mayoritas, tanpa melihat urgensi dari kebijakan apa yang perlu dikembangkan dan diimplementasikan.

Elemen-elemen Konsolidasi dan Perannya dalam Penurunan Demokrasi di Indonesia dan Filipina

Tahun 2016 menandakan momen kemunduran demokrasi di berbagai negara. Berbagai

lembaga yang mengukur indeks demokrasi menyodorkan data yang memperlihatkan bahwa sebagian besar negara dengan sistem demokrasi sedang mengalami kemunduran. Tidak hanya dirasakan oleh negara-negara dunia ketiga, tetapi juga dirasakan oleh negara kampiun demokrasi yaitu Amerika. Dalam beberapa kasus, penurunan kualitas demokrasi di seluruh dunia memiliki kesamaan, seperti menurunnya aspek kebebasan sipil, munculnya pemimpin populis, dan melemahnya institusi demokrasi (The Economist, 2019).

Empat elemen dalam konsolidasi demokrasi, yaitu masyarakat, elite, organisasi, dan *rule of law* dianalisis pada bagian ini untuk mengetahui bagaimana peran semua elemen tersebut dalam mencapai proses konsolidasi. Selain itu, analisis juga dilakukan untuk mengetahui apakah keempat elemen tersebut memiliki peran dalam terjadinya penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina pada periode 2016 sampai 2020.

1. Masyarakat

Preferensi masyarakat terhadap demokrasi sebagai sistem yang paling baik dan rasa puas mereka terhadap kinerja demokrasi merupakan salah satu tolak ukur dari demokrasi yang terkonsolidasi. Di Filipina pada survei terakhir yang dilakukan Pew Study tahun 2019 menunjukkan ada sekitar 69% dari masyarakatnya yang puas dengan kinerja demokrasi. Sementara itu, ada 31% dari masyarakat yang merasa tidak puas (Viray, 2019). Survei lain yang dilakukan oleh Social Weather Station (SWS) pada 2018 menunjukkan ada 59% warga Filipina yang memiliki preferensi bahwa demokrasi merupakan sistem terbaik dari sistem lainnya, dan ada 20% dari masyarakat yang memilih sistem otoriter. Hasil survei yang dirilis oleh lembaga SWS menunjukkan adanya penurunan preferensi masyarakat Filipina terhadap demokrasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Di tahun 2016 ada 63% masyarakat yang memilih demokrasi sebagai sistem terbaik, dan hanya sekitar 17% masyarakat yang memilih sistem otoriter (Geronimo, 2018).

Di Indonesia, survei yang dilakukan dalam 15 tahun terakhir oleh beberapa lembaga seperti SMRC (Saiful Mujani Research and Consulting), Indikator Politik Indonesia, dan LSI (Lembaga Survei Indonesia) menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Indonesia mendukung demokrasi sebagai sistem politik yang paling baik, walaupun dalam perjalanannya dukungan tersebut mengalami fluktuasi. Pada 2004, tingkat dukungan masyarakat mencapai 87.6%. Namun, pada 2010 turun menjadi 78%. Pada 2013, data tersebut mencapai titik terendah, yaitu hanya sekitar 58.1%. Survei terakhir yang dilakukan pada 2019 menunjukkan sekitar 78.1% masyarakat setuju bahwa demokrasi merupakan bentuk terbaik (Mujani, 2020).

Walaupun dukungan terhadap demokrasi di Filipina dan Indonesia terbilang tinggi, indikator masyarakat belum mampu mencapai konsolidasi demokrasi. Di Indonesia munculnya *intolerant democrat syndrome* pada akhir 2013 membuat tingginya penilaian masyarakat terhadap sistem demokrasi menjadi bias (Mujani, 2020). Hal ini karena tingginya angka penilaian bahwa demokrasi sebagai sistem yang paling baik berbanding terbalik dengan rendahnya angka toleransi politik. Jika melihat ke belakang, naiknya trend *intolerant democrat syndrome* juga bersamaan dengan berlangsungnya pemilihan presiden tahun 2014. Fenomena ini dapat membuat demokrasi tidak terkonsolidasi secara signifikan karena adanya hambatan dari toleransi politik. Sementara di Filipina, tren peningkatan fenomena *intolerant democrat syndrome* muncul bersamaan dengan berjalannya kebijakan *war on drugs*. Tingginya preferensi masyarakat Filipina terhadap demokrasi sebagai sistem terbaik berbanding terbalik dengan realita yang ada di lapangan yang menunjukkan banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling dasar, yaitu hak untuk hidup akibat implementasi kebijakan *war on drugs*.

Dalam masyarakat, toleransi politik merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai konsolidasi demokrasi. Dengan kata lain, semakin toleran masyarakat, maka akan semakin kuat preferensi mereka terhadap demokrasi. Preferensi ini merupakan tolok ukur

bagi konsolidasi demokrasi pada level sikap individual (Mujani, 2020).

Sejak 2016 terjadi polarisasi pada masyarakat Indonesia. Demonstrasi dilakukan oleh kelompok Islamis yang menuntut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses secara hukum karena dinilai telah menistakan agama Islam. Gerakan tersebut memberikan efek domino yang buruk bagi iklim toleransi Indonesia sejak 2016 dan bertahan sampai 2020. Jika merujuk data yang dikeluarkan oleh lembaga SMRC, kasus intoleransi di masyarakat telah terjadi dan mulai meningkat sejak 2010, yaitu pada saat rumah ibadah Ahmadiyah dibakar karena dianggap aliran sesat (Mietzner dan Muhtadi, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa tren peningkatan fenomena *intolerant democrat syndrome* bukan baru terjadi pada tahun 2013 akhir, tetapi benih-benihnya telah tumbuh sejak 2010. Kasus intoleransi terhadap kelompok minoritas agama ataupun pandangan politik tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Perlu pendekatan-pendekatan khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang semakin carut-marut ini.

Berbicara mengenai polarisasi di Filipina, berbeda dengan di Indonesia yang dalam lima tahun terakhir terjadi polarisasi yang cukup “merusak” kehidupan berdemokrasi, Filipina tidak memiliki gejala-gejala polarisasi tersebut. Beberapa ahli memaknai polarisasi yang merusak dalam kehidupan bermasyarakat saat menguatnya narasi “*kami*” versus “*mereka*” (Kenny, 2020). Selain itu, kriteria terjadinya polarisasi adalah saat masyarakat secara politik terbelah menjadi dua blok, yaitu blok pro-Duterte dan anti-Duterte.

Namun, satu dekade lalu, perlu diingat juga bahwa Filipina pernah mengalami fenomena yang dikenal dengan “*lost decade*” pada tahun 2001 sampai 2010. Selama satu dekade tersebut, demokrasi di Filipina mengalami kemunduran karena polarisasi yang terjadi antara *grandi* (oligarki) dan *popoli* (masyarakat kelas bawah). Konflik yang terjadi antara *grandi* dan *popoli* mengakibatkan terjadinya konflik kelas (Arugay dan Slater, 2019).

Sementara itu, isu kebebasan berpendapat dalam lima tahun terakhir di Indonesia mendapatkan rapor merah. Pasalnya, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) tentang “setuju atau tidak warga makin takut menyatakan pendapat”, ada 21,9% masyarakat sangat setuju. Selain itu, ada 47,7% masyarakat yang menjawab agak setuju (Pradipta, 2020). Hal ini berkaitan dengan adanya pasal UU ITE. Undang-Undang tersebut dianggap sebagai faktor signifikan yang mempengaruhi tingginya angka masyarakat yang merasa sulit untuk menyatakan pendapat dan kritik. Sejak 2016 sampai 2020, tercatat ada 216 kasus yang diproses sampai di ranah pengadilan. Namun, diperkirakan masih banyak data yang belum masuk karena banyaknya pelaporan. Seperti pada tahun 2019, diperkirakan ada sekitar 3000-an kasus yang menggunakan pasal UU ITE (SAFENet, 2019).

Di Filipina, kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam lima tahun terakhir mengalami kemunduran. Banyak lawan politik dan oposisi yang dituntut karena vokal dalam mengkritik pemerintahan Duterte. Seperti yang dialami oleh Senator Leila de Lima. Pada 2017 ia dituntut hukuman tiga tahun penjara karena kritiknya terhadap Duterte terkait dengan kebijakan *war on drugs*. Selanjutnya, pada 2018 Senator Antonio Trillanes IV juga dituntut karena kritiknya terhadap pemerintah. Kebebasan pers di Filipina juga memiliki catatan merah. Misalnya seperti media berita online Rappler yang dicabut izinnya oleh lembaga negara yang berkaitan dengan pers dengan dalih penyebaran *hate speech* dan berita palsu. Selain itu, pada Juni 2020, pimpinan eksekutif dari media Rappler, Maria Ressa, juga dituntut karena pencemaran nama baik dan ancaman penjara dengan hukuman maksimal enam tahun (Kenny, 2020). Kuatnya kontrol pemerintah Duterte terhadap aspek-aspek kebebasan menjadi salah satu penyebab kebebasan sipil di Filipina terus menurun dalam lima tahun terakhir sesuai dengan laporan dari Freedom House.

Pada 2020, dari data yang dirilis oleh lembaga Varieties of Democracy (V-Dem) menunjukkan bahwa Covid-19 memberikan

dampak negatif bagi negara demokrasi. Banyak negara yang memberlakukan keadaan darurat dan *lockdown* tanpa dukungan suka rela dari elemen masyarakat. Filipina mulai memberlakukan *lockdown* pada 12 Maret 2020. Pelanggaran HAM yang terus terjadi selama masa *lockdown* terus memberikan dampak negatif bagi kondisi demokrasi di Filipina. Dari laporan V-Dem diketahui bahwa kualitas demokrasi di beberapa negara, termasuk Filipina, akan mengalami penurunan yang signifikan pada masa pandemi Covid-19 (Luhmann et al, 2020).

Walaupun Indonesia tidak masuk dalam kategori penurunan yang cukup parah pada masa pandemi, Indonesia tetap mengalami penurunan kualitas demokrasinya. Indonesia masuk dalam kategori *medium risk*, yang ditunjukkan dengan terjadinya pelanggaran dan penurunan standar demokrasi pada masa pandemi ini. Hal ini tentu berimplikasi pada kualitas demokrasi yang ada (Luhmann et al, 2020).

2. Elite

Data yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat demokrasi internasional Freedom House menunjukkan bahwa 25 dari 41 negara dengan demokrasi yang telah mapan mengalami resesi atau stagnasi demokrasi pada 2020. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami resesi dan stagnasi demokrasi. Berbeda dari resesi demokrasi pada periode-periode sebelumnya yang penurunan index demokrasinya dipengaruhi oleh peran militer, pada periode ini resesi dan stagnasi demokrasi disebabkan oleh pemimpin populis yang mendapat dukungan dari masyarakatnya (Muhtadi dan Muslim, 2020).

Di Filipina, Duterte terpilih secara demokratis melalui pemilu 2016. Walaupun terpilih secara demokratis, kualitas demokrasi di Filipina mulai mengalami penurunan sejak Duterte menjabat. Salah satu yang membuat kualitas demokrasi di Filipina menurun ditengarai oleh kebijakan *war on drugs*. Kebijakan tersebut merupakan cara yang digunakan Duterte dalam memberantas pengedar dan pengguna narkoba. Dari tahun 2016 sampai 2017, terhitung ada sekitar 7.025

orang yang telah meregang nyawa karena kebijakan kontroversial tersebut (Amnesty International UK, 2020).

Di satu sisi, angka peredaran narkoba masih terbilang tinggi. Walaupun di awal diberlakukannya kebijakan ini angka peredaran narkoba sempat turun, tetapi sampai tahun 2020, angka ini kembali seperti sedia kala. Hal ini karena target dari *war on drugs* adalah para pengedar dan pengguna kelas bawah, bukan bandar kelas atas. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak kunjung hilang hingga saat ini. Selain itu, kebijakan ini juga menyebarkan teror dan ketakutan bagi masyarakat kelas bawah karena mereka dijadikan target oleh aparat penegak hukum. Di sisi lain, kebijakan ini memberikan implikasi positif terhadap menurunnya angka kriminal, dan mendapatkan persetujuan luas masyarakat Filipina. Hal ini terlihat dari tingginya *approval rating* terhadap Duterte.

Dalam kasus Filipina, terjadinya *executive aggrandizement* atau kemahakuasaan eksekutif membuat kualitas demokrasi menurun pada masa Duterte. Ia yang dalam hal ini adalah eksekutif memiliki peran yang sangat dominan pada lembaga politik lainnya (legislatif dan yudikatif). Dapat dikatakan bahwa pada pemerintahan Duterte tidak tercapai *checks and balances*. Pada akhirnya kebijakan yang ia buat dan hasilnya tidak hanya untuk publik, tapi juga untuk mendesain ulang institusi demokrasi.

Banyak faktor yang pada akhirnya membuat terjadinya fenomena *executive aggrandizement*. Di antaranya yaitu: masyarakat sipil yang lemah, banyak kelompok masyarakat sipil berpengaruh yang ditarik ke pemerintahan, masyarakat sipil yang kurang diberdayakan, serta masyarakat sipil yang lemah karena adanya kebiasaan atau *shifting* sehingga mereka sulit untuk menaruh perhatian khusus pada urusan-urusan publik/pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan data yang dikeluarkan oleh lembaga *Varieties of Democracy* pada 2017. Data tersebut menunjukkan aspek *civil society* mengalami penurunan di Filipina. Penurunan aspek ini telah terjadi sejak 2013, tetapi penurunan yang cukup signifikan terjadi pada 2016. Hal ini terlihat dari tekanan pemerintah terhadap organisasi masyarakat

sipil. Penurunan tersebut mulai mencapai titik mengkhawatirkan bersamaan dengan naiknya Duterte menjadi presiden Filipina pada 2016 (Meckhova dan Pernes, 2019).

Sama halnya dengan fenomena *executive aggrandizement* yang terjadi di Filipina, di Indonesia, pada tahun 2017 pemerintahan Jokowi dianggap telah melakukan bentuk dari supermasi eksekutif. Misalnya, adanya pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah kelompok Islamis yang mempromosikan khilafah sebagai sistem politik (Mietzner, 2020). Perlu dicatat juga bahwa pembubaran kelompok HTI dilakukan tanpa adanya proses hukum. Hal tersebut dianggap membuat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran.

Pada September 2019 terjadi gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh pelajar. Gerakan ini merupakan gerakan kelompok pelajar yang terbesar setelah 1998. Gerakan ini menantang pemerintahan Jokowi dan elite-elite politik lainnya. Di tengah-tengah tren polarisasi dalam masyarakat sipil, gerakan pelajar ini dapat dikatakan hadir di tengah-tengah untuk meredakan polarisasi dengan membuat *common enemy* yaitu para perancang undang-undang yang bermasalah.

Untuk meredam gerakan demonstrasi yang meluas ke daerah-daerah di pelosok negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh sosial. Dalam pertemuan tersebut pihak kementerian melakukan sosialisasi dengan para tokoh sosial untuk dapat mencegah pelajar turun melakukan aksi demonstrasi. Selain itu, pihak kementerian juga melakukan pertemuan dengan rektor-rector kampus di Indonesia untuk membahas hal yang sama (Mietzner, 2020).

Tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan intimidasi sistematis dianggap lebih efektif daripada kekerasan publik yang dilakukan aparat hukum terhadap para demonstran. Efektivitas tindakan tersebut terlihat dari menurunnya jumlah peserta demonstrasi secara drastis. Gerakan demonstrasi yang sebelumnya dilakukan secara nasional, pada bulan Oktober hanya tersisa segelintir kelompok demonstran di Jakarta dan Yogyakarta. Tindakan keras yang diambil oleh

pemerintahan Jokowi merupakan penindasan paling berat kepada gerakan pelajar sejak Reformasi 1998.

Selain fenomena *executive aggrandizement*, muncul pula fenomena *illiberal* demokrasi atau yang lebih dikenal dengan demokrasi kosong. Fenomena ini muncul karena pemimpin populis yang terpilih secara demokratis melalui pemilihan umum, pada masa pemerintahannya hanya tertarik pada demokrasi dalam pandangan elektoral. Artinya, aspek-aspek lain dalam demokrasi, seperti aspek kebebasan sipil dan kebebasan politik dikesampingkan. Di Filipina dan Indonesia, mayoritas elite lebih melihat demokrasi dari sudut pandang elektoral.

Di Filipina, hal ini terbukti dari beberapa kasus kriminalisasi yang dilakukan Duterte terhadap lawan politiknya. Pada 2017, senator terpilih Leila De Lima ditangkap oleh pihak berwajib karena kritiknya yang keras terhadap Duterte mengenai kebijakan *war on drugs* yang dijalankan (Regencia, 2019). Selain senator De Lima, Duterte juga melakukan penahanan terhadap senator Antonio Trillanes IV. Penangkapan Antonio juga ditengarai akibat kerasnya kritik yang selalu dilontarkan pada Duterte terkait kebijakan-kebijakan-kebijakan yang dijalankan (Hincks, 2018).

3. Organisasi

Adanya organisasi yang demokratis merupakan prasyarat untuk mencapai demokrasi yang terkonsolidasi. Tidak diragukan lagi bahwa organisasi seperti partai politik dan institusi demokrasi merupakan motor penggerak politik di suatu negara. Untuk mencapai institusi demokrasi yang ideal, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Syarat tersebut seperti pemilu bebas adil, peran partai politik, dan peradilan yang independen.

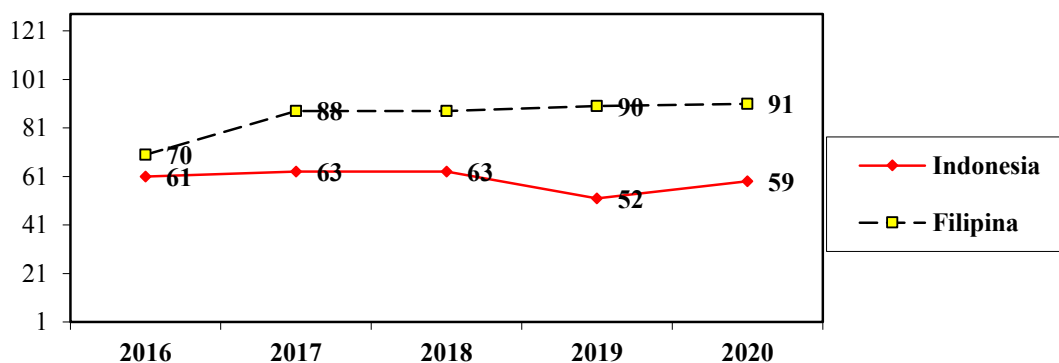
Di Filipina dalam lima tahun terakhir, syarat-syarat tersebut belum dapat terpenuhi. Seperti partai politik, idealnya mereka harus mandiri dan memiliki akar konstituen yang kuat. Namun, di Filipina partai politik hanya merupakan kendaraan elektoral para klan oligarki untuk dapat mencapai kekuasaan. Partai politik besar seperti Partai Nacionalista

merupakan kendaraan politik bagi Manuel Villar yang merupakan orang terkaya kedua di Filipina. Sementara itu, Partai Persatuan Nasional merupakan kendaraan politik Enrique Razon yang merupakan orang terkaya kelima di Filipina. Selain itu, ada Partai Nasionalis Koalisi Rakyat yang merupakan kendaraan bagi Eduardo Cojuangco Junior yang adalah orang terkaya keempat belas di Filipina, dan banyak contoh lainnya (Kenny, 2020).

Di Indonesia, para analis mengekspresikan kekhawatiran mereka terhadap rendahnya kualitas institusi demokrasi Indonesia yang ditandai dengan rendahnya institusionalisasi partai politik dan tingginya angka politik uang dalam pemilihan. Untuk meningkatkan kualitas institusi demokrasi, masyarakat perlu memantau institusi tersebut agar tercapainya *checks and balances*. Hal ini untuk menutup kesempatan bagi aktor dan elite untuk mencapai tujuan otoriter melalui institusi demokrasi yang dikuasainya (Fossati et al, 2021).

Dalam survei terakhir yang dilakukan oleh Indikator Politik pada Februari 2021 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di Indonesia sangat rendah. Partai politik hanya meraih skor 47,8%, jika dibandingkan dengan instansi dan lembaga negara lain seperti DPR, DPD, dan Polisi (Kumparan News, 2021).

4. Rule of Law



Sumber: World Justice Project (WJP), 2016-2020

Grafik 3. Kurva Peringkat *Rule of law* Indonesia dan Filipina Periode 2016-2020

Rule of Law merupakan unsur penting untuk mencapai demokrasi yang terkonsolidasi. Negara-negara yang dianggap telah mencapai demokrasi yang mapan memiliki *rule of law* yang kuat. Artinya, semua warga tidak dilihat latar belakangnya, dan semua memiliki tingkat yang sama di hadapan hukum.

Data yang dikeluarkan oleh WJP (World Justice Project), Lembaga yang rutin setiap tahunnya merilis index *rule of law* negara-negara di dunia memberikan data bahwa index *rule of law* di Filipina terus mengalami penurunan. Walaupun Filipina menjadi negara demokrasi tertua di Asia Tenggara, tidak menjamin kualitas *rule of law* negara tersebut baik. Peringkat index *rule of law* Filipina dapat dilihat pada Grafik 3.

Lembaga WJP menggarisbawahi tiga faktor utama yang menyebabkan kualitas *rule of law* Filipina terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Tiga faktor tersebut adalah banyaknya pelanggaran hak-hak dasar, ketertiban dan keamanan, dan hukum pidana (World Justice Project, 2020).

Dari laporan WJP mengenai aspek hak-hak dasar seperti perlakuan yang adil dalam masyarakat, hak untuk hidup dan mendapat keamanan, dan hak untuk mendapatkan kelayakan hukum merupakan tiga aspek dalam hak-hak dasar yang memiliki skor paling rendah. Rendahnya skor dari masing-masing aspek berhubungan dengan kebijakan *war on drugs* yang dijalankan pemerintahan Duterte sejak 2016 sampai sekarang. Kebijakan tersebut dikatakan melanggar hampir seluruh hak dasar yang harus dimiliki oleh warga negara. Bahkan,

hak untuk hidup dan mendapatkan keamanan juga tidak dapat terpenuhi. Hal tersebut terbukti dari banyaknya jumlah korban jiwa akibat kebijakan *war on drugs* (World Justice Project, 2020).

Mengenai faktor ketertiban dan keamanan, meskipun pemerintahan Duterte terkenal dengan kondisi ketertiban dan keamanan yang baik, tetapi peringkat Filipina secara global yang paling tinggi hanya diraih pada 2016. Setelah itu, peringkat ketertiban dan keamanan kembali anjlok pada peringkat 107 dan terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Kebijakan *war on drugs*, meskipun dianggap memiliki efek jera, tetapi efek tersebut hanya berlaku pada para pengedar dan pengguna narkoba. Bentuk kejahatan lainnya tetap memiliki tempat di dalam masyarakat dan secara umum data kriminalitas terus bertambah (World Justice Project, 2020).

Pada aspek terakhir, yaitu aspek hukum pidana, berdasarkan laporan WJP, beberapa unsur pada aspek ini juga mendapatkan “rapor merah” dalam lima tahun terakhir. Unsur-unsur seperti penindakan yang berdasarkan hukum, efektivitas investigasi, dan tidak adanya diskriminasi mendapatkan skor di bawah rata-rata. Filipina hanya meraih skor rata-rata sebesar 0.32 dalam aspek hukum pidana. Peringkat paling tinggi yang berhasil diraih Filipina adalah peringkat 84 dari 113 negara (World Justice Project, 2020).

Sementara di Indonesia, World Justice Project menunjukkan data yang sama mengkhawatirkannya dengan data di Filipina.

Peringkat tertinggi yang pernah diraih oleh Indonesia adalah peringkat ke-52. Ada banyak faktor yang memengaruhi indeks *rule of law* di Indonesia. World Justice Project menjabarkan dua faktor utama yang menyebabkan indeks *rule of law* di Indonesia tidak membaik dalam lima tahun terakhir yaitu tingginya angka korupsi, dan hukum perdata yang tidak memenuhi kriteria minimum (World Justice Project, 2020).

Data yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), menunjukkan bahwa tren penindakan kasus korupsi sejak 2016 terus meningkat sampai 2018. Namun, pada 2019 dan 2020 tren peningkatan kasus tersebut justru berkurang drastis. Walaupun terjadi pengurangan kasus korupsi, data WJP menunjukkan bahwa skor dan peringkat korupsi di Indonesia tetap tinggi. Sampai 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-92 negara paling korup di dunia (Alamsyah, 2020).

Berbicara mengenai hukum perdata, ada beberapa alasan mengapa indikator tersebut memengaruhi rendahnya peringkat dan kualitas *rule of law* di Indonesia. Beberapa aspek yang diukur dalam hukum perdata di Indonesia dianggap tidak memenuhi standar. Seperti aspek ketiadaan diskriminasi, ketiadaan korupsi, ketiadaan campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam hukum, dan lainnya yang belum dapat dipenuhi. Pada aspek ketiadaan diskriminasi, dalam lima tahun terakhir dapat terlihat bahwa sangat banyak kasus hukum yang berbau diskriminasi pada kelompok minoritas, seperti kasus pembakaran tempat ibadah (World Justice Project, 2020).

Populisme dan Penurunan Kualitas Demokrasi di Indonesia dan Filipina

Dari penelitian yang dilakukan oleh The Atlantic sejak 1990 sampai 2018, ada lebih dari 30 negara demokrasi yang terjangkit populisme. Hasil dari penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa para pemimpin populis di setiap negara memiliki kemampuan dalam mempertahankan kekuasaan dan memberikan bahaya besar bagi kualitas demokrasi. Dalam satu dekade terakhir,

ada beberapa pemimpin populis yang namanya menjadi sorotan internasional seperti Bolsonaro (Brazil), Narendra Modi (India), Donal Trump (Amerika), Victor Orban (Hungaria), Joko Widodo (Indonesia), Rodrigo Duterte (Filipina), dan beberapa nama lainnya (Moouk dan Kyle, 2018). Pada bagian ini dilakukan analisis terhadap populisme dan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina.

1. Jokowi dan Populisme Teknokrat

Figur Jokowi sangat lekat dengan populisme. Hal itu telah ada dan terbangun sejak ia maju sebagai calon Walikota Solo. Populisme Jokowi dibangun atas dasar kerakyatan. Ia berasal dari latar belakang keluarga kelas menengah dan hanya merupakan seorang anggota partai politik, bukan ketua umum partai politik. Selain itu, metode kampanye *blusukan* dengan turun langsung ke rakyat dan mengetahui problem sehari-hari yang dialami masyarakat dianggap menghilangkan kesan elite politik dan antek oligarki. Slogan kampanye “Jokowi adalah kita” berhasil mengantarkannya pada kemenangan pemilihan presiden 2014 (Sulistyo, 2017).

Mietzner menyebut Jokowi sebagai sosok populis teknokrat. Hal tersebut terlihat dari bagaimana Jokowi memprioritaskan sisi efisiensi dalam setiap kebijakannya, terutama pada kebijakan reformasi birokrasi yang dijalankannya. Selain itu, populisme teknokrat memiliki ciri utama yaitu peningkatan sesuatu, bukan mengganti dengan yang baru. Bisa dilihat dari banyak kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak diganti, tetapi diperbarui pada pemerintahan Jokowi (Mietzner, 2015).

Populisme teknokrat Jokowi memiliki ciri khasnya sendiri, yaitu konsep keterbukaan. Ciri khas ini berhasil menggeser gaya politik lama yang terkesan eksklusif (Margiansyah, 2019). Gaya teknokrat Jokowi mengarahkannya pada kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik dan pembangunan ekonomi.

Tiga kebijakan populer Jokowi yang dianggap populis contohnya yaitu pengobatan gratis dan pendidikan terjangkau bagi masyarakat kelas bawah, serta kebijakan *developmentalisme* pembangunan infrastruktur. Beberapa ahli menilai populisme gaya Jokowi

berbeda dengan populisme lainnya. Ia tidak secara eksplisit menyerang kelompok elite yang dianggap sebagai kelompok yang korup, tetapi membuat gagasan reformasi birokrasi (Hara, 2017).

Populisme teknokrat Jokowi memiliki sifat yang pragmatis. Hal ini terlihat dari kebijakan yang dihasilkan selama masa pemerintahan Jokowi, yaitu kebijakan-kebijakan yang fokus pada perekonomian. Ekonomi merupakan hal yang sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, saat Jokowi memprioritaskan kebijakan ekonomi dari kebijakan lainnya, maka ia akan mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Namun, hal itu membuat pengembangan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan sipil dan visi demokrasi menjadi tidak dapat terwujud. Jokowi menganggap bahwa pengembangan nilai dan visi demokrasi hanya dapat dinikmati beberapa kalangan saja. Secara garis besar ia ingin mendapatkan dukungan mayoritas. Oleh karena itu, beberapa lembaga yang mengukur indeks demokrasi memberikan catatan penting bahwa kebijakan yang hanya fokus pada pembangunan perekonomian dapat memberikan dampak negatif bagi demokrasi. Pembangunan yang terlalu fokus pada sisi perekonomian akan menyebabkan dikesampingkannya aspek-aspek lain. Selain itu, akan memperparah gap ekonomi antara kelas atas dan kelas bawah. Dalam perspektif jangka panjang, kebijakan ini nantinya justru hanya akan dinikmati oleh segelintir golongan saja. Dengan demikian akan semakin mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia.

2. Duterte dan Populisme Penal

Duterte dikenal sebagai pemimpin populis dan *anti-establishment*. Pemimpin populis yang muncul sebelumnya adalah Estrada. Banyak ahli mengatakan bahwa akan terjadi fenomena "*illiberal democracy*" di bawah kepemimpinan Duterte. Hal tersebut karena sebelumnya Duterte sendiri telah menyampaikan pada rakyat Filipina untuk melupakan hukum dalam upaya memaksakan "ketertiban".

Berdasarkan hasil survei yang dikutip oleh Mark. R Thompson dalam artikelnya, hanya sekitar lima persen dari rakyat Filipina yang menolak kampanye melawan kriminalitas dan narkoba (Thompson, 2016). Isu kriminalitas sering digunakan oleh populis, sehingga mendapatkan nomenklatur tersendiri. Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah dukungan terhadap Duterte datang dari kalangan kelas menengah yang khawatir terhadap rasa aman. Hal ini mengindikasikan terjadinya fenomena *penal populism* (Kenny, 2018).

Penal populism atau populisme Penal merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan pemerintah mengambil kebijakan pemberian hukuman berat pada tindak kriminal atau hal lain yang berkaitan. Pengambilan kebijakan tersebut juga sejalan dengan tren masyarakat yang sedang resah dengan maraknya tingkat kriminalitas. Pengambilan kebijakan tersebut dilakukan semata hanya untuk mendapatkan simpati dan dukungan politis masyarakat kelas menengah (Anggara et al., 2019). Populisme Penal sangat identik dengan pemimpin kharismatik yang lebih mengandalkan norma legitimasi pemungutan suara di suatu daerah daripada aturan, institusi, dan prosedur yang diatur (Kenny, 2018).

Dapat terlihat dari kebijakan *war on drugs* yang dijalankan sejak awal kepemimpinan Duterte, selama masa kampanye politik Duterte kerap memanfaatkan isu keresahan masyarakat kelas menengah akan ketertiban dan keteraturan. Masalah utama yang dihadapi adalah maraknya narkoba dalam masyarakat. Kebijakan *war on drugs* adalah janji kampanye Duterte pertama yang dilaksanakan dan mendapat dukungan dari masyarakat secara luas di Filipina yang ditunjukkan dengan tingginya *approval rating* Duterte. Meskipun demikian, kebijakan ini justru menjadi bumerang terhadap kualitas demokrasi di Filipina sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Populisme Penal yang dilaksanakan Duterte justru menjadi salah satu faktor yang turut berperan dalam perburukan kualitas demokrasi di Filipina.

Penutup

Indonesia dan Filipina merupakan dua contoh kecil dari terjadinya fenomena regresi demokrasi di dunia. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. *Pertama*, proses konsolidasi demokrasi dalam lima tahun terakhir, baik di Indonesia maupun di Filipina, menghadapi beberapa kendala yang menyebabkan demokrasi tidak dapat terkonsolidasi. Elemen dalam konsolidasi demokrasi (masyarakat, elite, organisasi, dan *rule of law*) yang harusnya berintegrasi justru menunjukkan gejala yang bertolak belakang dan menghasilkan proses dekonsolidasi demokrasi.

Kedua, penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina memperlihatkan faktor-faktor yang hampir mirip, tetapi dengan gejala dan karakteristik yang sedikit berbeda. Pada elemen masyarakat, di Indonesia terjadi polarisasi yang memiliki efek domino sejak 2016 sampai 2020. Polarisasi tersebut membuat kualitas demokrasi pada level masyarakat mengalami kemunduran. Berbeda dengan Indonesia, Filipina tidak mengalami polarisasi di dalam masyarakatnya. Di sisi lain, terdapat persamaan yang menyebabkan penurunan kualitas demokrasi di Filipina dan Indonesia pada level masyarakat, yaitu turunnya indeks kebebasan sipil.

Elite di Indonesia dan Filipina dalam lima tahun terakhir berperan dalam terjadinya penurunan kualitas demokrasi. Munculnya fenomena *executive aggrandizement* di kedua negara membuat lembaga eksekutif lebih dominan dari lembaga-lembaga lain dan membuat hilangnya *checks and balances* dalam pemerintahan. Pada elemen organisasi, partai politik masih mendapatkan *rating* merah. Hal tersebut terlihat dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di kedua negara. Pada elemen *rule of law*, kedua negara juga masih memiliki catatan merah. Lembaga World Justice Project memberikan *highlight* pada banyaknya aspek dalam *rule of law* di kedua negara yang perlu ditingkatkan untuk mencapai demokrasi yang terkonsolidasi.

Ketiga, pemimpin yang populis juga menjadi salah satu penyebab terjadinya fenomena regresi demokrasi di dunia, termasuk di Indonesia dan Filipina dalam lima tahun terakhir. Perlu ditekankan bahwa terdapat perbedaan klasifikasi populisme di kedua negara ini. Indonesia (Jokowi) dengan populisme teknokrat, dan Filipina (Duterte) dengan populisme penal. Secara garis besar, implikasi buruk dari pemimpin populis di kedua negara ini terlihat dari output dan kebijakan yang dihasilkan. Sebagian besar kebijakan yang dihasilkan hanya untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari mayoritas masyarakat, yang pada akhirnya mengesampingkan nilai dan visi demokrasi. Hal tersebut membuat kualitas demokrasi di kedua negara ini turun.

Perlu kajian lebih lanjut untuk mempelajari interaksi dari banyak faktor dan proses seperti apa yang membuat penurunan kualitas terjadi. Ada beberapa kesamaan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas demokrasi baik di Indonesia maupun di Filipina. Pertama adalah dominasi eksekutif, dalam hal ini respons presiden dalam bertindak dan menghadapi kritik. Mereka melihat kritik tersebut sebagai ancaman terhadap keamanan. Kedua, terkait persoalan kebebasan berekspresi yang dalam lima tahun terakhir mendapatkan tantangan yang hebat. Ketiga, isu populisme yang tidak kalah penting yang juga berperan dalam terjadinya penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, W. (2020). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I%202020.pdf>, diakses pada tanggal 7 Maret 2021.
- Amnesty International UK. (18 Mei 2020). *More Than 7000 Killed in the Philippines in Six Months, as President Encourages Murder*. <https://www.amnesty.org.uk/philippines-president-duterte-war-on-drugs-thousands-killed>, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.
- Anggara et al. (2019). *Kebangkitan Penal Populism di Indonesia: Catatan Situasi Reformasi Kebijakan Pidana di Indonesia Tahun 2018*. Institute for Criminal Justice Reform. https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/01/FINAL-LAPORAN-TAHUNAN-ICJR_14-JANUARI-2018.pdf, diakses pada tanggal 2 Maret 2021.
- Arugay, A., dan Dan Slater. (2019). Polarization Without Poles: Machiavellian Conflicts and the Philippines Lost Decade of Democracy, 2000-2010. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 681(1).
- Croissant, A., dan Phillip Lorenz. (2018). *Comparative Politics of Southeast Asia an Introduction to Governments and Political Regimes*. Springer.
- Diamond, L. (2003). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. IRE.
- Fossati, D., et al. (2021). Why democrats abandon democracy: Evidence from four survey experiments. *Party Politics*, XX(X), 1-13. doi:10.1177/1354068821992488.
- Freedom House. (2020). *Freedom In The World, Indonesia, 2020*. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020>, diakses pada 12 Februari 2021.
- Freedom House. (2020). *Freedom In The World, Philippines, 2020*. <https://freedomhouse.org/country/philippines/freedom-world/2020>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021.
- Geronimo, J. Y. (5 Oktober 2018). 84% of Filipinos Satisfied With How Democracy Works – SWS. *Rappler*. <https://www.rappler.com/nation/filipinos-satisfaction-democracy-sws-survey-september-2018>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021.
- Hara, A. E. (2017). Populism in Indonesia and its Threats to Democracy. *Advances in Social Science, Education, and Humanities Research (ASSEHR)* 129.
- Hinks, J. (4 September 2018). Philippines President Rodrigo Duterte Has Ordered the Arrest of a Chief Political Opponent. *TIME*. <https://time.com/5385672/rodrigo-duterte-antonio-trillanes-arrest/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.
- SAFENet. (14 November 2019). *Persoalan UU ITE dan Praktik Pelanggaran Hak Digital di Indonesia*. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Persoalan-UU-ITE-dan-Pelanggaran-Hak-Digital-SAFENet-2019.pdf>, diakses pada tanggal 24 Februari 2021.
- Idhom, A. M. (25 September 2019). Isi RUUKUHP dan Pasal Kontroversial Penyebab Demo Mahasiswa Meluas. *Tirto*. <https://tirto.id/isi-ruu-kuhp-dan-pasal-kontroversial-penyebab-demo-mahasiswa-meluas-eiFu>, diakses pada tanggal 25 Februari 2021.
- Kenny, P. D. (2018). *Populism in Southeast Asia*. Cambridge University Press.
- Kenny, P. D. (2020). *Why is There No Political Polarization In the Philippines?*. Carnegie Endowment for International Peace.
- Kumparan News. (8 Februari 2021). *Survei Indikator: DPR Lembaga Negara Paling tak Dipercaya Publik*. <https://kumparan.com/kumparannews/survei-indikator-dpr-lembaga-negara-paling-tak-dipercaya-publik-1v8VtbDtl2D/full>, diakses pada tanggal 8 Maret 2021.
- Margiansyah, D. (2019). Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya Dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Penelitian Politik* 16(1), 1-107.
- Meckhova, V, dan Josefina Pernes. (2019). *Accountability in Southeast Asia & Southeast Africa*. The Varieties of Democracy Institute.
- Mietzner, M, dan Burhanuddin Muhtadi. (2018). Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation. *Asian Studies Review* 42(3), 1-19.

- Mietzner, M. (2020). Source of Resistance to Democratic Decline: Indonesian Civil Society and Its Trials. *Journal Democratization* 28(1), 1-19.
- Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and political Contestation in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Miller, J. (2018). *Duterte Harry: Fire and Fury in the Philippines*. Scribe Publications.
- Mouk, Y, dan Jordan Kyle. (26 Desember 2018). What Populists Do to Democracies. *The Atlantic*. <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/12/hard-data-populism-bolsonaro-trump/578878/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021.
- Muhtadi, B, dan Kennedy Muslim. (4 Agustus 2020). *Populism, Islamism, and Democratic Decline in Indonesia*. , <https://www.mei.edu/publications/populism-islamism-and-democratic-decline-indonesia>, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.
- Muhtadi, B. (2019). *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral Mengurai Jalan Panjang Demokasi Prosedural*. Intrans Publishing.
- Mujani, S. (2020). Intolerant Democrat Syndrome: The Problem of Indonesian Democratic Consolidation. *Jurnal Politik* 8(1), 5-35.
- Pradipta, K. A. (29 Oktober 2020). Survei Indikator Politik: Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat. *Tempo*. <https://grafis.tempo.co/read/2288/survei-indikator-politik-masyarakat-makin-takut-menyatakan-pendapat>, diakses pada tanggal 5 Maret 2021.
- Qodari, M. (2010). The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisation and Political Consultants. Dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. ISEAS Publishing.
- Regencia, T. (25 Juni 2019). Duterte Attempting to 'Silence Political Opponents': Report. *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/news/2019/6/25/duterte-attempting-to-silence-political-opponents-report>, diakses pada tanggal 23 Februari 2021.
- Sulistyo, E. (31 Januari 2017). Populisme Jokowi. *Portal Resmi Kantor Staf Presiden*. <https://www.ksp.go.id/populisme-jokowi.html>, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.
- The Economist. (2 Februari 2021). *Global Democracy Has a Very Bad Year*. <https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year>, diakses pada tanggal 10 Maret 2021.
- The Economist. (2020). *The Economist Intelligence Unit's Democracy Index 2019*. <https://infographics.economist.com/2020/democracy-index-2019/index.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2021.
- Thompson, M. R. (2016). Bloodied Democracy: Duterte and the Death of Liberal Reformism in the Philippines. *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 35(3), 39-68.
- V-Dem Institute. (2020). *Democracy Report 2020: Autocratization Surges – Resistance Grows*. https://www.v-dem.net/media/filer_public/de/39/de39af54-0bc5-4421-89ae-fb20dcc53dba/democracy_report.pdf, diakses pada tanggal 10 Maret 2021.
- Viray, P. L. (30 April 2019). 69% of Filipinos Satisfied with Democracy – Pew Poll. *Philstar Global*. <https://www.philstar.com/headlines/2019/04/30/1913823/69-filipinos-satisfied-democracy-pew-poll>, diakses pada tanggal 1 Maret 2021.
- World Justice Project. (2020). *World Justice Project Rule of Law Index 2020*. https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf, diakses pada tanggal 13 Februari 2021.
- Yahya, A. N. (21 Mei 2020). Kualitas Demokrasi Indonesia Dinilai Cenderung Menurun ini Faktornya. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/21/19501101/kualitas-demokrasi-indonesia-dinilai-cenderung-menurun-ini-faktornya?page=all>, diakses pada tanggal 25 Februari 2021.
- Ronald, F. I dan Pippa Norris. (2016). *Tump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash*. [Makalah dalam diskusi]. Roundtable on Rage Against the Machine: Populist Politics in the U.S.